

**LAPORAN KINERJA  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2017**



## DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN .....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	36
BAB IV PENUTUP .....	51

### LAMPIRAN :

LAMPIRAN 1 : Renstra Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru 2016 - 2021

**IKHTISAR EKSEKUTIF****DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2017**

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2017 ini disusun. Laporan Kinerja (LKj) ini menyajikan capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dan juga sebagai pelaksanaan dari Inpres No. 7 tahun 1999, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 dan Permenpan No 53 tahun 2014 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun Laporan Kinerja (LKj). Selain itu Laporan Kinerja (LKj) ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru secara menyeluruh.

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, yang secara ringkas tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dapat diikhtisarkan bahwa 5 (lima) indikator kinerja sasaran berkategori **Sangat Berhasil**, yaitu sebagai berikut :

No	Sasaran	Penanggung Jawab	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
1	Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Dishub	95,65	Sangat Berhasil
2	Terwujudnya sarana angkutan yang aman dan nyaman	Dishub	96,39	Sangat Berhasil

3	Terwujudnya layanan administrasi yang berkualitas	Dishub	100	Sangat Berhasil
4	Terwujudnya sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas	Dishub	100	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Dishub	100	Sangat Berhasil

Dari tabel di atas terlihat adanya keberhasilan yang ditunjukkan dengan capaian indikator sasaran diatas 95% (sembilan puluh lima persen). Hal tersebut tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang.

Banjarbaru, Januari 2018  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Banjarbaru



**AHMAD YANI, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641102 198903 1 006

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru melaksanakan rencana strategis dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat.

---

#### **A. LATAR BELAKANG**

---

Latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2017 adalah adanya keinginan yang kuat dari Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk mewujudkan *Good governance*, berlandaskan pada *TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999* tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Peraturan Presiden RI No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Lapoan Kinerja. Perwujudan *Good governance* ini diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

---

Bagian akhir dari sistem AKIP adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj). Laporan Kinerja disusun pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, dimana capaian kinerja dikomunikasikan kepada para stakeholders.

Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama*, Laporan Kinerja merupakan sarana bagi SKPD untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. *Kedua*, Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja SKPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

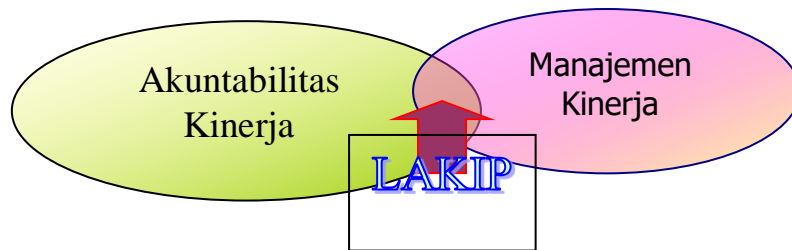
---

### **C. ASPEK STRATEGIS**

---

Sedangkan yang menjadi aspek strategis penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2017 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2017. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2017.
- b. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2017 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Dinas Perhubungan, Kota Banjarbaru dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.



#### **D. KONDISI UMUM DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU**

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru ditetapkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru mempunyai Tugas membantu

Walikota ***Melaksanakan urusan pemerintah Daerah dalam bidang***

***Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas***

***Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.***

***Fungsi*** Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sarana Prasarana dan Transportasi;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan
4. Pelaksanaan administrasi penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
5. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun unsur – unsur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari ;

1. **Bagian Sekretariat**

Bagian Sekretariat mempunyai **tugas pokok** menyelenggarakan urusan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 2) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Perhubungan;
- 3) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan**

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan di bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas, Rekayasa dan Data serta Keselamatan Lalu Lintas.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya bidang lalu lintas angkutan jalan mempunyai fungsi ;

- 1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lalu lintas angkutan jalan;
- 2) Penyelenggaraan program pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas, perencanaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan;
- 3) Penyelenggaraan program penyusunan dan perencanaan rekayasa lalu lintas jalan kota, provinsi dan nasional dan penyediaan serta pengolahan data lalu lintas.
- 4) Penyelenggaraan program pelayanan bimbingan keselamatan dan ketertiban jalan, analisis daerah rawan kecelakaan, serta penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

## **3. Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi**



Bidang sarana prasarana dan transportasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang sarana prasarana dan transportasi yang melakukan sebagian tugas pokok Dinas Perhubungan di bidang pengembangan sarana dan rasarana, pengujian dan perbengkelan serta angkutan dan terminal.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya bidang sarana prasarana dan transportasi mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana prasarana dan transportasi;
- 2) Penyelenggaraan program perencanaan penyediaan sarana prasarana perhubungan, penunjukan lokasi rencana pembangunan terminal, dan halte.
- 3) Penyelenggara program pengawasan pengujian kendaraan bermotor, usaha perbengkelan umum, pengawasan usaha latihan mengemudi;
- 4) Penyelenggaraan program penetapan rencana umum jaringan trayek dan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan.

#### **4. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Kegiatan teknis operasional yang dimaksud adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Kegiatan teknis yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggungjawab langsung Kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Unit pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru terdiri dari:

- a. UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor

Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor yang mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Pengujian Kendaraan bermotor secara berkala dan pengawasan serta pembinaan perbengkelan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dilingkungan Dinas Perhubungan;
- 2) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 3) Pelaksanaan program pengawasan pengujian kendaraan bermotor, usaha perbengkelan umum, pengawasan usaha latihan mengemudi.
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. UPT Pengelolaan Perparkiran

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran dipimpin oleh seorang Kepala Unit Kepala Teknis Dinas Pengelolaan Perparkiran yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perparkiran pada unit pelaksanaan teknis (UPT) pengelolaan parkir, mengelola urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan asset sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kepala Dinas Perhubungan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru.
- 2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru
- 3) Pelaksanaan sosialisasi peraturan teknis operasional pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Banjarbaru
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

### **E. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS**

---

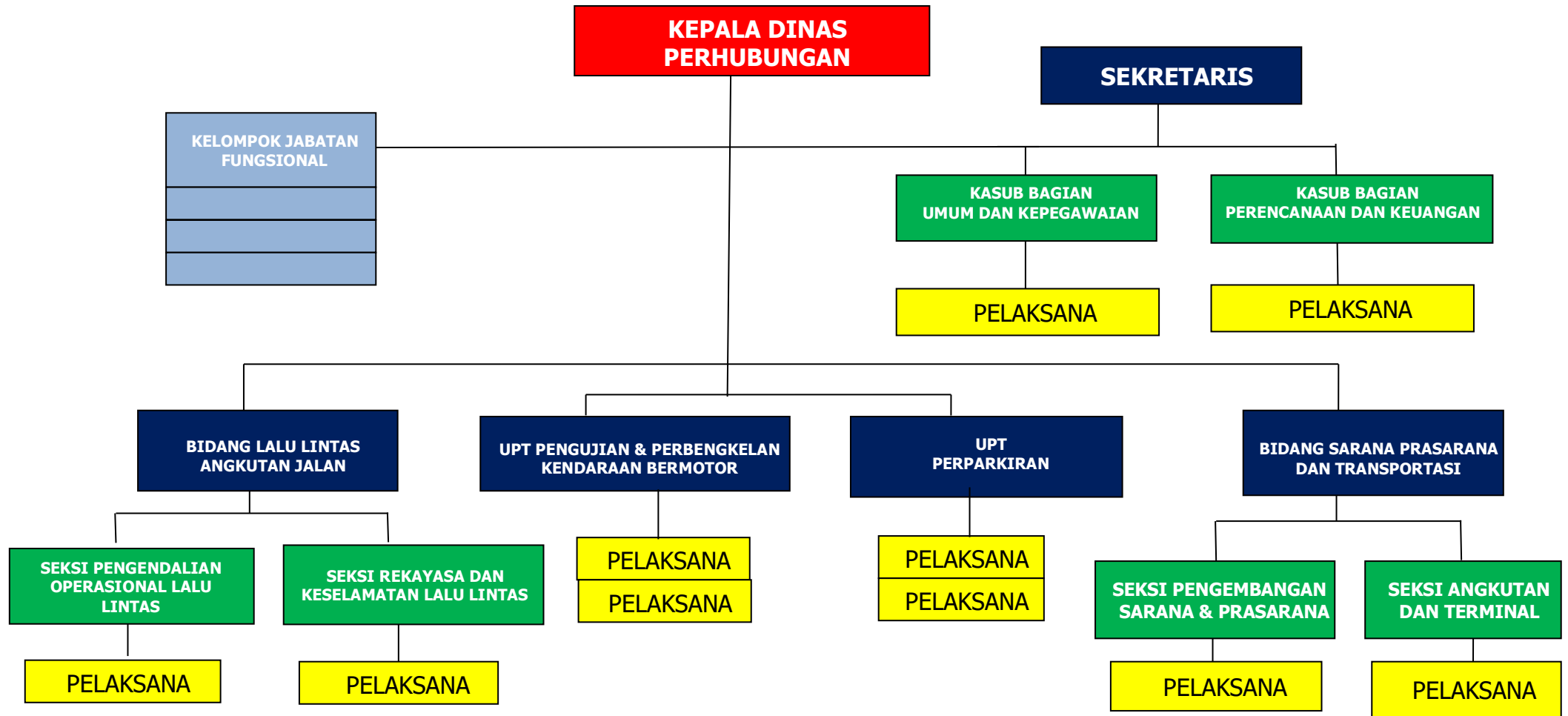
Beberapa permasalahan utama pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagai berikut:

1. Permasalahan Utama Urusan Perhubungan :
  - a. Untuk mengembangkan kreatifitas dan ide-ide dalam pembuatan konsep perencanaan perhubungan masih terkendala dengan terbatasnya tenaga ahli yang terdidik secara fungsional.

- b. Jalur trayek yang diperlukan oleh masyarakat pengguna jasa angkutan masih belum maksimal.
  - c. Program pendukung pengembangan di bidang perhubungan masih terdapat beberapa kelemahan.
2. Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru antara lain :
- a. Program pendukung pengembangan di bidang perhubungan masih terdapat beberapa kelemahan;
  - b. Masih belum maksimalnya tingkat rasa aman dan nyaman serta laik jalan kendaraan angkutan;
  - c. Terbatasnya tenaga ahli yang terdidik secara fungsional untuk mengembangkan kreatifitas dan ide-ide dalam pembuatan konsep perencanaan perhubungan
  - d. Masih adanya infrastruktur aparatur yang belum terbangun dan terpelihara
  - e. Belum terwujudnya tertib perencanaan dan pelaporan dengan penuh tanggung jawab

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk melaksanakan tugas dan tupoksinya dengan baik sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BANJARBARU**



**Pegawai Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2017 sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dan 2 (dua) orang petugas kebersihan yang terdiri dari :**

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 40 orang
Pegawai Tidak Tetap (PTT)	: 3 orang
Tenaga Kontrak	: 19 orang
Petugas Keamanan	: 2 orang

Dengan posisi jabatan sebagai berikut

Kepala Dinas (ess. II )	: 1 orang
Sekretaris (ess. III)	: 1 orang
Kepala Bidang (ess. III)	: 2 orang
Kasubag / Kasi (ess. IV)	: 10 orang
Pejabat Fungsional	: 3 orang
Staf PNS / PTT / Tenaga Kontrak	: 45 orang
Keterangan Tambahan	: Petugas Keamanan 2 orang

#### **Keadaan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2017**

Jumlah pegawai ( PNS + PTT + KONTRAK ) menurut pendidikan																				
SD	SMP	SMA	DI	DII	DIII	DIV	S1	S2	S3	Jumlah										
1	4	15	-	-	14	-	30	8	-	62										
Jumlah PNS menurut golongan / kepangkatan																				
Golongan I					Golongan II					Golongan III					Golongan IV					Jumlah
A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	A	B	C	D	Jlh	
-	-	-	-	-	2	7	6	3	18	3	7	8	7	25	3	1	1	-	5	40
Jumlah PNS + PTT + KONTRAK berdasarkan usia																				
20 s/d 30					31 s/d 40					41 s/d 50					51 s/d 56					

28	20	16	11

Jumlah Pejabat Fungsional : 3 Orang  
 Jumlah Pejabat Struktural : 15 Orang

Nama dan Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun 2017.

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Sumarno, A.Ma.PKB	197107311993031002	Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan.
2	Mugeni Azzanie,A.Md	197808072010011013	Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pemula.
3	Sugianto	197606012007011016	Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor Pemula

#### **D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru ini dilakukan dengan membentuk fokus grup, yang berperan mengevaluasi kembali unsur renstra atau menguraikan lebih lanjut rumusan tujuan dan sasaran Dinas menjadi sasaran yang lengkap dengan indikator kinerjanya. Masing-masing kegiatan tahun 2017 yang sudah dilaksanakan oleh satuan kerja akan dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas.

Adapun sistematika penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun 2017 adalah sebagai berikut :

#### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- LATAR BELAKANG
- MAKSUD DAN TUJUAN

- ASPEK STRATEGIS
- KONDISI UMUM SKPD
- SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- RENSTRA
- RENCANA KINERJA TAHUNAN
- PENETAPAN KINERJA

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- REALISASI ANGGARAN

**BAB IV PENUTUP**

**BAB II**



## **PERENCANAAN KINERJA**

### **RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021**

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2016– 2021 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru menetapkan rencana strategis tahun 2016–2021 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen perencanaan strategis tersebut telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### **Visi dan Misi**

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, maka visi itu menjadi penuntun dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan segala aktivitas.

Dalam setiap instansi pemerintah atau organisasi perlu memiliki visi agar mampu unggul dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat. Perumusan visi Dinas Perhubungan kota Banjarbaru mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat seluruh komponen bagian di lingkungan Instansi sehingga memiliki orientasi masa depan.

Mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya dan untuk dapat menentukan arah dan tujuan organisasi agar dapat konsisten dan eksis maka **Visi Dinas Perhubungan kota Banjarbaru** adalah :

***”Mewujudkan Pelayanan Bidang Perhubungan  
Yang Berkualitas dan Berkarakter”***

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru harus mampu mewujudkan suatu sistem transportasi yang tertib, lancar dan aman. Maka untuk itu Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru harus dapat menyediakan jasa transportasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sektor lain yang akan berfungsi menggerakkan dinamika pembangunan kota Banjarbaru yang maju dan terdepan.

Visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Menetapkan misi adalah upaya yang dilakukan sebagai tahapan pencapaian visi, sehingga hal-hal yang terlihat abstrak dalam visi akan lebih nyata dan dapat dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan.

Sedangkan misi merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai instansi pemerintah atau organisasi dimasa mendatang oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi yang berisi suatu peraturan yang menetapkan tentang tujuan pokok dan fungsi organisasi serta suatu sasaran yang hendak dicapai melalui penerapan strategi yang dipilih.

Misi suatu instansi atau organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan, dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Misi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah :

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penertiban lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan nyaman dalam mendukung Pemerintah Kota Banjarbaru.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan, parkir, terminal, pengujian kendaraan bermotor, operasi trayek angkutan transportasi darat.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung segala aspek pelayanan transportasi.
- d. Termanfaatkannya jasa sarana dan prasarana, fasilitas lalu lintas guna peningkatan PAD.

## **Tujuan dan Sasaran**

### **Tujuan**

Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang, tujuan juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi suatu instansi atau organisasi.

### **Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam sasaran dirancang juga indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran jangka menengah berdasarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah :

1. **Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah, dengan cara :**
  - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perhubungan, guna terciptanya kenyamanan bagi pengguna angkutan umum.
  - Penyediaan angkutan umum untuk pelajar yang gratis dan bersubsidi.
  - Pengelolaan terminal dengan baik dari segi system maupun retribusi terminal guna meningkatkan kenyamanan pengguna.
2. **Terwujudnya sarana angkutan yang aman dan nyaman, dengan cara :**
  - Meningkatkan kendaraan angkutan yang laik jalan.
  - Meningkatkan kelancaran akses lalu lintas pada titik-titik kemacetan yang ada.
3. **Terwujudnya layanan administrasi yang berkualitas, dengan cara :**
  - Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, bila perlu adanya penambahan personel.
  - Menata regulasi penyelenggaraan transportasi.
  - Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.
4. **Terwujudnya sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas, dengan cara :**
  - Penyediaan sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas.
  - Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi.
5. **Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja, dengan cara :**
  - Mengurangi jumlah temuan pemeriksaan.
  - Menindaklanjuti semua temuan yang ada dengan segera.

## **Strategi dan Kebijakan SKPD**

### **1) Strategi**

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan

dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program, antara lain.

- a. Mengendalikan kemacetan lalu lintas yaitu dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalulintas, marka jalan, marka parkir, rekayasa lalu lintas, penertiban parkir liar dan sebagainya.
- b. Mengoperasikan angkutan umum massal yang aman, nyaman dan relatif terjangkau dapat menarik kembali pengguna transportasi umum yang sempat beralih ke kendaraan pribadi (khususnya sepeda motor) dengan mengoperasikan Sarana Angkutan Umum Massal. Selain kenyamanan tidak kalah pentingnya adalah faktor keselamatan, maka faktor kelaikan kendaraan menjadi faktor penting untuk disikapi dengan melengkapi perangkat pengujian kendaraan bermotor.
- c. Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan seperti penyediaan halte angkutan umum yang layak dan memadai sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi untuk lebih tertib pada saat menunggu sarana transportasi umum. Juga keberadaan terminal dengan segala fasilitas penunjang yang layak bagi penumpang/pengguna jasa transportasi umum bias meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
- d. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk mengikuti beberapa Diklat, baik teknis maupun non teknis.

## 2) Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru.

Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah:

a. Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu, melalui :

- Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan tingkat pelayanan, kenyamanan dan keamanan pemakaian jalan.
- Menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dengan pengadaan fasilitas parkir umum serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan parkir tersebut.

b. Penerapan Sistem Data ( SIMDA) Terintegrasi, melalui :

- Pengendalian pengoperasian komputer, penyimpanan data, penyediaan pengamanan perangkat keras/lunak komputer dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA).
- Pelaksanaan kerjasama teknis dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik dan informasi.
- Penyusunan kebijakan teknis serta rencana dan program pengembangan serta pengolahan data elektronik.

## **Program**

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru telah menetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 ( satu ) tahun. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
3. Kegiatan jasa kebersihan kantor
4. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
9. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
10. Kegiatan Penyediaan jasa non PNS

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2. Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil jabatan
3. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
4. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
5. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
6. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
7. Pengadaan Peralatan gedung kantor

#### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

#### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan  
Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
2. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang

**6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas  
Perhubungan**

1. Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan
2. Peningkatan pengelolaan Terminal Angkutan Darat
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)

**7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan  
Fasilitas LLAJ**

1. Rehabilitasi/pemeliharaan Rambu jalan dan Lampu Peringatan
2. Rehabilitasi/pemeliharaan Halte/shelter

**8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**

1. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan raya
2. Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan
3. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan Jasa Angkutan
4. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
5. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
6. Pemilihan Pelajar Pelopor Berlalu lintas

**9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas**

1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
2. Pengadaan Marka Jalan
3. Pengadaan Lampu Peringatan Jalan
4. Pengamanan Lalu Lintas Jalan dan Pengawasan



## **10. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**

1. Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Kendaraan Bermotor
2. Pendataan/Pembinaan Usaha Perbengkelan Umum
3. Monitoring dan Pembinaan Usaha Perbengkelan Umum

## **RENCANA KINERJA TAHUN 2017**

### **PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017**

Penetapan Kinerja Tahun 2017 merupakan komitmen seluruh unsur Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dokumen ini memuat program dengan indikator kinerja sasaran. Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan / sasaran.

Adapun uraian lebih lanjut dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

## PERJANJIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2017

ESSELON II PEJABAT TINGGI PRATAMA								
Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Tahun 2017
<i>Program pendukung pengembangan di bidang perhubungan masih terdapat beberapa kelemahan</i>	Meningkatnya kapasitas infrastruktur	Persentase infrastruktur kota dalam kondisi baik	100%	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Persentase fasilitas lalulintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	Fasilitas lalulintas angkutan jalan yang baik dapat memperlancar arus lalulintas di jalan	Jumlah Fasilitas lalulintas (rambu, lampu peringatan, halte) yang direhab dibagi jumlah fasilitas lalulintas yang akan direhab berdasarkan permintaan masyarakat dikali 100%	100%
					Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal	Prasarana dan fasilitas lalulintas yang berfungsi dengan baik dapat memperlancar arus lalulintas	Jumlah armada yang angkutan umum yang masuk terminal dibagi jumlah izin trayek angkutan umum yang dikeluarkan dikali 100%	50%
					Cakupan penyebab kemacetan lalu lintas yang teratasi	Tingkat kemacetan yang masih belum teratasi	Jumlah aspek yang tertangani dibagi jumlah aspek yang harus ditangani kali 100%	100%
Masih belum maksimalnya tingkat rasa aman dan nyaman serta laik jalan kendaraan angkutan	Meningkatkan kendaraan angkutan yang aman dan nyaman serta laik jalan	Persentase tingkat kendaraan angkutan yang aman dan	90%	Terwujudnya sarana angkutan yang aman dan nyaman serta laik jalan	Persentase beroperasinya angkutan yang aman dan nyaman	Kendaraan angkutan yang beroperasi dengan aman akan meningkatkan rasa	Persentase pelajar yang terangkut dibagi jumlah permintaan angkutan pelajar dikali 100%	80%

		nyaman serta laik jalan				aman bagi penumpang		
Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Tahun 2017
					Persentase kendaraan yang laik jalan	Kondisi kendaraan wajib uji yang laik jalan berpengaruh terhadap keselamatan berlalulintas	Kendaraan angkutan orang dan barang yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan angkutan orang dan barang wajib uji dikali 100%	85%
<i>Terbatasnya tenaga ahli yang terdidik secara fungsional untuk mengembangkan kreatifitas dan ide-ide dalam pembuatan konsep perencanaan perhubungan</i>	Mewujudkan layanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%	Terwujudnya layanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Persentase layanan administrasi perkantoran	Memenuhi target Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dibagi total jumlah layanan perkantoran yang seharusnya ada dikali 100%	100%
Masih adanya infrastruktur aparatur yang belum terbangun dan terpelihara	Mewujudkan sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas	Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik	100%	Terwujudnya sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas	Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik	Memenuhi target Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Jumlah sarana aparatur dalam kondisi baik dibagi total jumlah sarana aparatur yang dikelola dikali 100	100%
Belum terwujudnya tertib perencanaan dan pelaporan dengan penuh tanggung jawab	Mewujudkan tertib perencanaan dan pelaporan dengan penuh tanggung jawab	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Persentase temuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti	Dalam rangka pembenahan administrasi program dan keuangan pada SKPD	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan dikali 100%	100%

ESSELON III PEJABAT ADMINISTRATOR					
Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi / Penjelasan	Target 2017	Program	2017
Tersedianya angkutan pelajar gratis	Jumlah pelajar yang memanfaatkan angkutan gratis	Jumlah terangkutnya pelajar yang menggunakan angkutan gratis	1,500 Pelajar	Peningkatan Pelayanan Angkutan	694,437,850
Meningkatnya kelancaran lalu lintas angkutan jalan	Jumlah fasilitas lalulintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	Jumlah fasilitas lalulintas angkutan jalan yang berfungsi dengan baik (rambu, lampu peringatan, halte)	27 buah	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	125,648,000.00
Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah armada angkutan umum yang memanfaatkan prasarana dan fasilitas di terminal	Jumlah armada angkutan umum yang masuk ke terminal	50 armada	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	509,552,800.00
Terlaksananya penanganan penyebab kemacetan lalu lintas	Jumlah titik pantau (jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten)	1. Simpang 4 banjarbaru 2. Q mall Banjarbaru 3. Lampu merah Brimob 4. perempatan LIK 5. KFC 6. Lampu Merah 33 Loktabat	6 titik	Program pengendalian dan pengamanan lalu Lintas	930,654,350

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji	Jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji	Data jumlah kendaraan wajib uji pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	6,000 buah	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	109,360,100
Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi / Penjelasan	Target 2017	Program	Anggaran 2017
Meningkatnya pelayanan angkutan	<i>Load Factor</i> angkutan	Jumlah rata-rata penumpang angkutan dibagi dengan kapasitas angkutan di kali 100%.	25%	Peningkatan Pelayanan angkutan	694,437,850
Cakupan layanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan tugas rutin perkantoran	Persentase pelayanan tugas rutin perkantoran	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	732,926,176
terwujudnya sarana aparatur yang berkualitas	Persentase sarana aparatur yang terpelihara dengan baik	jumlah sarana aparatur yang terpelihara dibagi jumlah sarana aparatur yang dikelola dikali 100	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	412,942,000
	Persentase jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dibagi jumlah pegawai pada dinas perhubungan dikali 100%	100%	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	117,450,000
	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah diklat yang dilaksanakan dibagi jumlah kebutuhan diklat dikali 100%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	43,800,000
Terwujudnya akuntabilitas kinerja pada SOPD Perhubungan	Persentase temuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan dikali 100%	100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	49,379,500

ESSELON IV PEJABAT PENGAWAS					
Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2017	Program	Kegiatan	Anggaran 2017
Terwujudnya Pemeliharaan Rambu dan Lampu Peringatan Jalan	Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas dan Lampu Peringatan	20 rambu 4 warning light 3 halte	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu jalan dan lampu peringatan	74,208,000
Terwujudnya pemeliharaan halte/shelter	Jumlah halte/shelter yang terpelihara	3 buah	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Rehabilitasi/ pemeliharaan halte/shelter	51,440,000
Terpeliharanya Median Jalan dan Trotoar	Terpeliharanya Median Jalan dan Trotoar		Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Pemeliharaan Median Jalan dan Trotoar	-
Terlaksananya peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan	Pelaksanaan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	1 kegiatan	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	72,610,950
		1 kegiatan	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	197,589,900
		15 OP	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	115,551,950
Terlaksananya Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Terlaksananya Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)		Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Pelaksanaan penghargaan wahana tata nugraha (WTN)	300,000
Tersedianya Rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu-rambu Lalu Lintas	106 buah	Program pengendalian dan pengamanan lalu Lintas	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	212,844,000
Terwujudnya Pengamanan Lalu Lintas yang aman, tertib dan lancar	Terpasangnya Lampu Peringatan jalan	1 buah	Program pengendalian dan pengamanan lalu Lintas	Pengadaan lampu peringatan jalan	197,317,000

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

Terwujudnya Pengamanan Lalu Lintas yang aman, tertib dan lancar	Terlaksananya Pengamanan Lalu Lintas Jalan dan Pengawasan Pejabat Daerah	12bulan	Program pengendalian dan pengamanan lalu Lintas	Pengawasan lalu lintas jalan dan pengawasan	139,369,350
Tersedianya Marka Jalan	Jumlah Marka Jalan	1,500meter	Program pengendalian dan pengamanan lalu Lintas	Pengadaan marka jalan	223,037,000
Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2017	Program	Kegiatan	Anggaran 2017
Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kendaraan wajib uji	Pengawasan dan pembinaan kendaraan wajib uji	12 Bulan	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Pengawasan dan pembinaan kelaikan kendaraan bermotor	42,210,000
Terwujudnya pendataan dan pembinaan usaha perbengkelan umum	Pendataan dan pembinaan usaha perbengkelan	90 kali	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Pendataan/ pembinaan usaha perbengkelan umum	23,277,500
Terwujudnya pendataan dan pembinaan usaha perbengkelan umum	Pendataan dan pembinaan usaha perbengkelan	166 kali	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Monitoring dan pembinaan usaha perbengkelan umum	43,872,600
Terwujudnya Pemilihan Pelajar Pelopor BerlaluLintas	Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	1 kegiatan	Peningkatan pelayanan angkutan	Pemilihan pelajar pelopr berlalulintas	44,454,800
Terwujudnya Pengawasan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan lebaran	Pengawasan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan lebaran	3 kegiatan	Peningkatan pelayanan angkutan	Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	3,952,950
Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan	Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan	1 dokumen	Peningkatan pelayanan angkutan	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	50,764,950
persentase pemilihan sopir/juru mudi angkutan umum teladan	persentase pemilihan sopir/juru mudi angkutan umum teladan	1 kegiatan	Peningkatan pelayanan angkutan	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	48,746,800
Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Jumlah operasional angkutan pelajar	30 unit	Peningkatan pelayanan angkutan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	541,351,100

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

Terlaksananya koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah armada angkutan pelajar	2 buah	Peningkatan pelayanan angkutan	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	3,952,950
Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2017	Program	Kegiatan	Anggaran 2017
Jumlah dokumen bermaterai	Jumlah dokumen bermaterai	100 %	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	3,000,000
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	79,998,000
Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	100 %	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7,200,000
Persentase jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	Persentase jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	100 %	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	15,000,000
Persentase jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100 %	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19,999,900
Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5,600,000
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,200,000
Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	100 %	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan makanan dan minuman	42,075,800
Jumlah rapat-rapat konsultasi dan kordinasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat konsultasi dan kordinasi keluar daerah	100 %	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	231,652,476
Persentase jmlh tenaga honorarium PTT/kontrak	Persentase jmlh tenaga honorarium PTT/kontrak	100 %	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa non PNS	325,200,000



Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	24,100,000
<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran</b>	<b>Target 2017</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran 2017</b>
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor	24,850,000
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil jabatan	34,928,000
Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah dan jenis Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ operasional	249,964,000
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2,600,000
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	10,800,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	65,700,000
Persentase pakaian dinas dan kelengkapannya	Persentase pakaian dinas dan kelengkapannya	100 %	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	117,450,000
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan non formal	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan non formal	100 %	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan non formal	43,800,000
Dokumen Perencanaan dan keuangan	Dokumen Perencanaan dan keuangan	100 %	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	38,234,600
Inventarisasi aset/barang Dinas Perhubungan	Inventarisasi aset/barang Dinas Perhubungan	100 %	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perencanaan dan Pelaporan Manajemen aset/barang daerah	11,144,900



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006** tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah **dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi** Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran, keluaran dari masing-masing kegiatan, serta hasil (outcome) yang dicapai. Dalam tahun 2017 Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru melaksanakan 10 (sepuluh ) program dan 42 empat puluh dua kegiatan.

LAKIP 2017 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru menetapkan katagorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut:

Skala Nilai Perangkat Kinerja No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kreteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1). Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

## A. CAPAIAN KINERJA KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja, Dinas Perhubungan memiliki 5 (lima) sasaran dan yang harus dilaksanakan. Dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dapat diikhtisarkan bahwa 5 (lima) indikator kinerja sasaran berkategori **Sangat Berhasil**, yaitu sebagai berikut :

No	Sasaran	Penanggung Jawab	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
1	Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Dishub	95,65	Sangat Berhasil
2	Terwujudnya sarana angkutan yang aman dan nyaman	Dishub	96,39	Sangat Berhasil
3	Terwujudnya layanan administrasi yang berkualitas	Dishub	100	Sangat Berhasil
4	Terwujudnya sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas	Dishub	100	Sangat Berhasil
5	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Dishub	100	Sangat Berhasil

Adapun rincian capaian kinerja atas **5 sasaran** dengan kategorinya adalah sebagai berikut:

<b>1</b>	<b>Sasaran :</b> <b><i>Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah</i></b>
----------	--

**Penanggungjawab** atas pencapaian sasaran Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas tersebut adalah Dinas Perhubungan. Sasaran

tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

N o	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Targ et 2017	Realisa si 2017	% 2017	Realisa si 2016	Realisa si 2015	Perbandingan Capaian Kinerja 2017, 2016, dan 2015
1.	Persentase fasilitas Lalu lintas Angkutan jalan yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	100	100	sama
2.	Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal	%	50	43,48	86,96	80	75	meningkat
3.	Cakupan penyebab kemacetan Lalu lintas yang teratasi	%	100	100	100	95	90	meningkat
Rata-rata capaian					95,65			

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ***Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah*** adalah sebesar **95,65%** yang berarti masuk dalam katagori capaian Berhasil yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Persentase Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berfungsi dengan baik.

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur Jumlah Fasilitas lalulintas (rambu, lampu peringatan, halte) yang direhab dibagi jumlah fasilitas lalulintas yang akan direhab berdasarkan permintaan masyarakat dikali 100%. Jumlah rambu-rambu yang direhab tahun 2017 sebanyak 20 buah, Lampu Peringatan jalan sebanyak 4 buah dan halte yang direhab sebanyak 3 buah. Dari total rambu, lampu peringatan jalan dan halte yang direhab sebanyak **27 Buah** (20 rambu + 4 lampu peringatan + 3 halte) maka diperoleh perhitungan

27 buah dibagi jumlah fasilitas yang direhab berdasarkan ***permintaan dari masyarakat*** sebanyak **27 buah** (20 rambu + 4 lampu peringatan jalan + 3 halte) maka diperoleh perhitungan  $27/27 \times 100\% = 100\%$ . **Untuk Persentase Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan yang berfungsi dengan baik adalah 100%** Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.

## **2. Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk menghitung Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal dengan perhitungan Data jumlah armada yang angkutan umum yang masuk terminal sebanyak **50 armada** dibagi jumlah izin trayek angkutan umum yang dikeluarkan sebanyak **115 armada** dikali **100%**

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator ***Persentase meningkatnya penggunaan prasarana pelayanan angkutan umum di terminal*** pada tahun 2017 adalah  $50/115 \times 100\% = 43,48\%$  dengan target tahun 2017 sebesar **50%** maka diperoleh capaian **43,48% dibagi 50% dikali 100% = 86,96%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Tinggi**.

## **3. Cakupan penyebab kemacetan Lalu lintas yang teratasi.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur **Cakupan penyebab kemacetan Lalu lintas yang teratasi** di 6 titik lokasi yaitu **Simpang empat banjarbaru, Q mall Banjarbaru, Lampu merah Brimob, Perempatan LIK, KFC, Lampu Merah KM 33 Loktabat.**

Berdasarkan 6 (enam) titik lokasi yang harus di lakukan penanganan penyebab kemacetan lalu lintas maka diperoleh capaian indikator kinerja **Cakupan penyebab kemacetan Lalu lintas yang teratasi** sebanyak **6 titik** lokasi yang telah tertangani dibagi jumlah permintaan titik dari kemacetan dari masyarakat sebanyak **6 titik** dikali 100% maka diperoleh capaian **sebesar**

**100%.** Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.

**2**

**Sasaran :**

***Terwujudnya sarana Angkutan yang aman dan nyaman serta laik jalan***

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran ***Terwujudnya sarana Angkutan yang aman dan nyaman serta laik jalan*** adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	% 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Perbandingan Capaian Kinerja 2017, 2016 Dan 2015
1.	Persentase beroperasinya angkutan yang aman dan nyaman	%	80	75%	93,75	90	85	Meningkat
2.	Persentase Kendaraan yang laik jalan	%	85	84,16	99,04	90	90	Meningkat
Rata-rata capaian					96,39			

#### **1. Persentase beroperasinya angkutan yang aman dan nyaman.**

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur kendaraan angkutan yang beroperasi dengan aman akan meningkatkan rasa aman bagi penumpang. Indikator ini mempunyai perhitungan persentase jumlah pelajar yang terangkut dibagi jumlah permintaan angkutan pelajar dikali 100%.

Berdasarkan data indikator kinerja diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator ***Persentase beroperasinya angkutan yang aman dan nyaman*** tersebut adalah jumlah pelajar yang terlayani angkutan pelajar sebanyak **1.500 orang** dibagi jumlah permintaan angkutan pelajar tahun 2017 sebanyak **2.000 orang** di kali 100%, maka diperoleh **realisasi** capaian sebesar **75%** dengan **target 80%** tahun 2017 maka diperoleh **Persentase Capaian Indikator Kinerja Sebesar 75% dibagi 80%**



$\times 100\% = \underline{93,75\%}$ . Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.

## 2. Persentase Kendaraan yang laik jalan.

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur Kondisi kendaraan wajib uji yang laik jalan yang berpengaruh terhadap keselamatan berlalulintas. Indikator Kinerja ini di perhitungkan dari jumlah Kendaraan angkutan orang dan barang yang lulus uji dibagi jumlah kendaraan angkutan orang dan barang wajib uji dikali 100%.

### JUMLAH KENDARAAN YANG DI UJI MENURUT JENIS KENDARAAN SETIAP TAHUN TAHUN 2017

#### Kota Banjarbaru

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH
<b>A</b>	<b>Umum</b>	
1	Mobil Barang	
	a. Truck	572
	b. Pick Up	310
	c. Tangki	84
2	Mobil Penumpang	
	a. Bus	23
	b. Minibus	166
	a. Angkot/Oplet	31
	b. Sedan	68
3	Tractor Head	7
<b>JUMLAH A</b>		<b>1261</b>
<b>B</b>	<b>Tidak Umum</b>	
1	Mobil Barang	
	a. Truck	641
	b. Pick Up	2.982
	c. Tangki	39
2	Mobil Penumpang	
	a. Bus	22

3	b. Minibus Tractor Head	84 6
<b>JUMLAH B</b>		<b>3.774</b>
<b>C</b>	<b>Dinas</b>	
1	Mobil Barang	
	a. Truck	34
	b. Pick Up	43
2	Mobil Penumpang	
	a. Bus	7
	b. Minibus	0
<b>JUMLAH C</b>		<b>84</b>
<b>D</b>	a. Tempelan	0
	b. Mixer	16
<b>JUMLAH D</b>		<b>16</b>
<b>E</b>	<b>JUMLAH A+B+C+D</b>	<b>5.135</b>

Berdasarkan data kinerja yang tersaji dalam tabel diatas maka diperoleh perhitungan **Realisasi** jumlah Kendaraan angkutan orang dan barang yang lulus uji tahun 2017 sebanyak **5.135 buah** dibagi **target** jumlah kendaraan angkutan orang dan barang wajib uji tahun 2017 sebanyak **6.100 buah** dikali 100% sama dengan 84,16%. Dari target tahun 2017 yang direncanakan sebesar 85% maka diperoleh Persentase Capaian Indikator Kinerja **Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan** adalah **84,16%** dibagi **85%** = **99,04%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Tinggi**.

**3****Sasaran :*****Terwujudnya Layanan Administrasi yang berkualitas***

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran ***Meningkatnya konektivitas antar SKPD dengan perangkat daerah lainnya*** tersebut adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	% 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2016	Perbandingan Capaian Kinerja 2017,2016, Dan 2015
1.	Persentase Layanan Administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	sama
Rata-rata capaian					100			

#### **1. Persentase Layanan Administrasi perkantoran.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur banyaknya Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dibagi total jumlah layanan perkantoran yang seharusnya ada dikali 100%.

Berdasarkan jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan tahun 2017 dibagi total jumlah layanan perkantoran yang seharusnya ada di tahun 2017 dikali 100% maka diperoleh **Persentase Layanan Administrasi perkantoran** sebesar **100%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **SangatTinggi**.

**4****Sasaran :*****Terwujudnya sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas***

---

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran **Terwujudnya sarana aparatur dan sarana publik yang berkualitas** tersebut adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru. Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

N o	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satua n	Targ et 2017	Realisa si 2017	% 2017	Realisasi 2016	Realisa si 2015	Perbandinga n Capaian Kinerja 2017,2016, Dan 2015
1.	Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	sama
Rata-rata capaian					100			

**1. Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur banyaknya Jumlah sarana aparatur dalam kondisi baik dibagi total jumlah sarana aparatur yang dikelola dikali 100%.

Berdasarkan jumlah sarana aparatur dalam kondisi baik pada tahun 2017 dibagi total jumlah sarana aparatur yang dikelola tahun 2017 dikali 100% maka diperoleh **Persentase sarana aparatur dalam kondisi baik** sebesar **100%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **SangatTinggi**.

## 5

**Sasaran :*****Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja***

Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2017	Realisasi 2017	% 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2015	Perbandingan Capaian Kinerja 2017, 2016, Dan 2015
1.	Persentase temuan pengelola anggaran yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	Sama
Rata-rata capaian					100			

**1. Persentase temuan pengelola anggaran yang ditindak lanjuti**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur banyaknya Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan dikali 100%.

Berdasarkan jumlah temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 dibagi total temuan tahun 2017 dikali 100% maka diperoleh **Persentase temuan pengelola anggaran yang ditindak lanjuti** sebesar **100%**. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **SangatTinggi**.

## B. REALISASI ANGGARAN

Data Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru untuk tahun anggaran 2017 adalah tersaji sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
I.	<b>BELANJA PROGRAM</b>			
	<b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
	11. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000.000	3000.000	100
	12. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	79.998.000	61.087.925	76,36
	13. Kegiatan jasa kebersihan kantor	7.200.000	7.200.000	100
	14. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	15.000.000	15.000.000	100
	15. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.999.900	19.999.800	99,99
	16. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	5.600.000	5.599.000	99,98
	17. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.200.000	3.200.000	100
	18. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	42.075.800	40.926.400	97,26
	19. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	231.652.476	231.479.508	99,92
	20. Kegiatan Penyediaan jasa non PNS	325.200.000	323.930.000	99,60
	<b>11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
	1. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	65.700.000	64.760.000	98,56
	2. Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil jabatan	34.928.000	29.924.550	85,67
	3. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	249.964.000	228.347.650	91,35
	4. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.600.000	2.600.000	100
	5. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.800.000	10.701.500	99,08
	6. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	24.100.000	24.100.000	100
	7. Pengadaan Peralatan gedung kantor	24.850.000	21.850.000	87,92
	<b>12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya	117.450.000	116.060.000	98,81
	<b>13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			

	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	43.800.000	-	-
<b>14.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
	3. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	38.234.600	38.234.600	100
	4. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	11.144.900	9.630.800	86,41
<b>15.</b>	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>			
	5. Sosialisasi kebijakan di bidang Perhubungan	72.610.900	55.013.300	75,76
	6. Peningkatan pengelolaan Terminal Angkutan Darat	197.589.900	185.250.000	93,75
	7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	115.551.850	49.426.850	42,77
	8. Pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	300.000	300.000	100
<b>16.</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>			
	1. Rehabilitasi/pemeliharaan Rambu jalan dan Lampu Peringatan	74.207.900	73.422.550	98,94
	2. Rehabilitasi/pemeliharaan Halte/8shelter	51.440.000	50.140.000	97,47
<b>17.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>			
	7. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan raya	49.086.250	43.134.250	87,87
	8. Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	50.764.950	50.476.450	99,43
	9. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan Jasa Angkutan	541.351.050	470.513.550	86,91
	10. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	48.746.800	46.554.800	95,50
	11. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	3.952.950	3.940.950	99,69
	12. Pemilihan Pelajar Pelopor Berlalu lintas	535.800	535.800	100
<b>18.</b>	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>			
	1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	212.844.000	181,699,600	85.37
	2. Pengadaan Marka Jalan	223.037.000	209,205,550	93.80
	3. Pengadaan Lampu Peringatan Jalan	192.317.000	186,680,000	97.07
	4. Pengamanan Lalu Lintas Jalan dan Pengawasan	139.369.200	115,192,900	82.65
	5. Pengadaan Water Barrier	158.087.000	181,699,600	96.12
<b>19.</b>	<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>			
	1. Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Kendaraan Bermotor	42.210.000	39.690.000	94,02
	2. Pendataan/Pembinaan Usaha Perbengkelan Umum	23.277.500	23.192.500	99,63
	3. Monitoring dan Pembinaan Usaha Perbengkelan Umum	43.872.600	37.584.600	85,66

	<b>JUMLAH BELANJA PROGRAM</b>	<b>3.721.150.326</b>	<b>3.352.740.383</b>	<b>90,10 %</b>

Alokasi dan Realisasi Anggaran UPT Pengujian Perbengkelan Kendaraan Bermotor Dishub Kota Banjarbaru Tahun 2017.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	630.000	630.000	100
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	27.000.000	20.654.194	76,49
	3. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	4.200.000	4.200.000	100
	4. Penyediaan alat tulis kantor	3.699.600	3.693.000	99,82
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	155.534.500	147.206.200	94,64
	6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.073.000	2.068.100	99,76
	7. Penyediaan makanan dan minuman	10.530.000	9.840.000	93,44
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.800.000	1.700.000	94,44
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	14.092.060	14.091.600	99,99
2	<b>Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur</b>			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.000.000	2.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40.929.500	40.388.100	98,67
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	49.250.000	20.475.000	41,57
	<b>TOTAL</b>	<b>311.738.660</b>	<b>266.946.194</b>	<b>85,63</b>



## **2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, tugas dan fungsinya dilaksanakan mulai dari tahapan perencanaan hingga evaluasi.

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung organisasi untuk menentukan dan mencapai tujuan yang diharapkan .Sekaligus sebagai tolak ukur kinerja pembangunan di bidang Perhubungan yang diharapkan mampu menjalani tantangan kedepan.

Perencanaan yang akurat, realistis, aplikatif, mantap dan matang, disusun menurut sistem monitoring yang efektif dalam usaha menunjang pembangunan Daerah .Dengan demikian segala usaha dioptimalkan untuk menggali potensi yang ada di dalam dan di luar organisasi dan harapan kedepan kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru semakin Nampak dengan inovasi, kemajuan, juga kualitas.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru tahun anggaran 2017 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun 2016–2021. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah 5 (lima) indikator kinerja sasaran berkategori **Sangat Tinggi**.

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap LKj ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang

### **STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil

analisis capaian kinerja pada Tahun 2017, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2017, yaitu sebagai berikut:

- c. Meningkatkan keselamatan transportasi, *melalui* :
  - Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi
  - Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha
  - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi
- d. Meningkatkan keamanan transportasi *melalui* :
  - Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi
  - Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi.
- e. Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, *melalui* :
  - Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute
  - Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi
  - Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi.

- f. Memenuhi SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai kebutuhan *melalui* :
- Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi.
  - Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi.
  - Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan.
  - Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.

Banjarbaru, Januari 2018

Kepala Dinas Perhubungan

Kota Banjarbaru,



**AHMAD YANI, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19641102 198903 1 006